KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pimpin rapat satgas bencana, Dasco langsung telepon Prabowo, urusan lancar
Tanggal : Minggu, 11 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Pimpin Rapat Satgas Bencana

Dasco Langsung Telepon Prabowo, Urusan Lancar



RAPAT BENCANA: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kemeja putih) memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Rehabilitasi Pascabencana bentukan pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

DJK DPR

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kembali menunjukkan kelihaiannya dalam mengurus masalah negeri ini.

Aksi terbaru terlihat saat Ketua Harian Partai Gerindra itu memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Berbagai keluhan soal bencana, beres diurus Dasco. Bahkan, Dasco bisa telepon langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meminta persetujuan kebijakan mendesak.

Dalam rapat itu, dari DPR hadir Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR), Nazaruddin Dek Gam (Ketua MKD), Abdul Wachid (Wakil Ketua Komisi VI), Andi Iwan Darmawan Aras (Wakil Ketua Komisi V), dan Kawendra Lukistian (Anggota DPR).

Sementara dari pihak Pemerintah hadir Mendagri yang juga Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Tito Karnavian, Menteri Pekejaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarat Sirait.

Hadir pula Wagub Aceh Fadhlullah dan jajaran, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, Wamen BPKP Agustina Arumsari, Wakil BP BUMN Teddy Barata, Sestama BNPB

VERSI DIGITAL ARTIKEL INI, SILAKAN SCAN QR CODE

BERSAMBUNG KE HAL 6

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Pemerintah Siapkan Bansos Rp 2 T Untuk Pemulihan Pascabencana

Area Bencana Semoga

... DARI HALAMAN 1

Sabtu (10/1/2026).

Rapat dimulai pukul 10.18 WIB. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar pada 30 Desember 2025. Hadir dalam rapat antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, Anggota Komisi IV DPR TA Khalid, serta pimpinan komisi lainnya.

Dari unsur pemerintah, hadir Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

"Satgas Pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak di Sumatera sudah dapat berjalan normal, dan diupayakan selesai sebelum Lebaran," kata Dasco.

Ia menjelaskan, pemulihan pascabencana Sumatera kini berada di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Sementara itu, Satgas DPR menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, regulasi, dan koordinasi.

Menurut Dasco, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dilakukan secara nasional dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik.

Sementara itu, perwakilan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR TA Khalid menjelaskan, terdapat empat permasalahan yang harus segera ditangani. Pertama adalah normalisasi sungai. Menurutnya, banyak sungai dipenuhi kayu dan material lain sehingga menghambat aliran air dan berpotensi memicu banjir susulan.

"Sungai ini yang menjadi prioritas utama," ucapnya.

Permasalahan kedua adalah pembukaan akses, terutama jalan menuju wilayah yang masih terisolasi. Ketiga, penyediaan hunian sementara (huntara) yang rencananya akan dibangun hingga 15 ribu unit. Satgas DPR siap membantu penyelesaian kendala pembangunan huntara, termasuk persoalan pengadaan lahan.

Permasalahan keempat adalah pembersihan rumah warga, khususnya hunian dengan kategori rusak ringan. "Kalau rumah sudah dibersihkan, kemungkinan warga tidak perlu masuk huntara," jelas Khalid.

Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, langsung melakukan pemetaan kondisi wilayah terdampak. Berdasarkan hasil pemetaan, daerah terdampak dibagi dalam tiga kategori, yakni wilayah yang sudah pulih atau mendekati normal, setengah pulih, dan belum pulih.

"Dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, masih terdapat 15 daerah yang masuk kategori belum pulih. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah wilayah belum pulih terbanyak, sementara Sumatera Barat menunjukkan tingkat pemulihan paling tinggi," kata Tito.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat sejak fase awal bencana, termasuk pembukaan akses jalan, pembangunan jembatan darurat, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah wilayah kini mulai menunjukkan kemajuan dengan kembali berfungsinya pemerintahan, layanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi warga.

Untuk mempercepat pemulihan, Tito mengusulkan penambahan sekitar 5.000 personel dari unsur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) guna membantu pembersihan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.

"Pemulihan harus dipercepat sebelum Ramadan karena setelah itu pekerjaan akan lebih berat," ujarnya.

Bansos Korban Banjir

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial adaptif kebencanaan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp 2 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp 600 miliar telah siap disalurkan.

Dana tersebut dialokasikan untuk santunan ahli waris dan korban luka, jaminan hidup, pengisian hunian sementara dan hunian tetap, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak.

Selain bantuan tunai, Kementerian Sosial juga menyiapkan bantuan isian rumah senilai Rp 3 juta per keluarga bagi penghuni hunian sementara dan hunian tetap, serta dukungan pemberdayaan ekonomi berdasarkan hasil asesmen lapangan.

Terkait pemulihan infrastruktur, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD telah menyelesaikan pembangunan 17 jembatan bailey dari target 40 unit. "Sementara jembatan aramco yang telah siap berjumlah 13 unit dan akan terus bertambah hingga mencapai 50 titik," kata Maruli dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, pembangunan jembatan dilakukan dengan konstruksi yang dirancang untuk menopang kendaraan berat serta mendukung pemulihan fasilitas publik, termasuk sekolah dan sarana umum lainnya. ■ MEN/DIT